

## HUBUNGAN INDONESIA AUSTRALIA PADA MASA PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI (2001-2004)

### INDONESIA-AUSTRALIA RELATIONS IN THE ERA OF PRESIDENT MEGAWATI SOEKARNOPUTRI (2001-2004)

Oleh: Eko Wahyu Junaidi dan Saefur Rochmat, S. Pd., M. Ir., Ph.D.  
Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta  
[Ekowjwj@gmail.com](mailto:Ekowjwj@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hubungan Indonesia-Australia pada awal era reformasi; (2) hubungan politik Indonesia-Australia pada masa Megawati Soekarnoputri; (3) hubungan ekonomi Indonesia-Australia pada masa Megawati Soekarnoputri; (4) hubungan bilateral Indonesia-Australia dibidang pendidikan, sosial dan budaya pada masa Megawati Soekarnoputri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari lima langkah. Langkah pertama ialah menentukan topik penelitian, langkah kedua ialah pengumpulan sumber baik itu primer maupun sekunder, langkah ketiga ialah verifikasi atau kritik sumber, langkah keempat ialah interpretasi dan langkah terakhir ialah historiografi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) hubungan Indonesia dan Australia pada awal era reformasi menurun. Hal ini dapat dilihat dari pemutusan hubungan militer serta publik dan pejabat kedua negara yang saling memberikan persepsi buruk mengenai hubungan Indonesia dan Australia. Upaya memperbaiki hubungan bilateral kedua negara yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid terhambat beberapa masalah, baik itu penolakan dari dalam negeri dan sedikitnya upaya Australia membalas tindakan Presiden Indonesia. (2) Hubungan politik dan militer Indonesia-Australia pada masa Megawati Soekarnoputri mulai meningkat. Hubungan diplomatik diantara kedua pemimpin negara lebih intensif. Hubungan politik Indonesia-Australia juga banyak terbantu dengan meningkatnya hubungan militer. (3) Hubungan ekonomi Indonesia dan Australia pada masa Megawati Soekarnoputri berjalan dengan baik. Bantuan ekonomi rutin diberikan Australia kepada Indonesia guna mempercepat pemulihan pasca krisis 1997. Namun semakin membaiknya ekonomi negara dan meningkatnya daya beli masyarakat membuat neraca perdagangan cenderung defisit bagi Indonesia. (4) Hubungan bilateral Indonesia-Australia di bidang pendidikan, sosial dan budaya meningkat dengan melanjutkan program yang terhenti dan program-program baru.

Kata kunci: Hubungan Indonesia-Australia, Megawati Soekarnoputri.

#### Abstract

*This study aimed to investigate: (1) Indonesia-Australia relations at the beginning of the reform era; (2) Indonesian-Australian political relations in the era of Megawati Soekarnoputri; (3) economic relations of Indonesia-Australia in the era of Megawati Soekarnoputri; and (4) Indonesia-Australia bilateral relations in the educational, social and cultural fields in the era of Megawati Soekarnoputri. This study used Kuntowijoyo's historical research method consisting of five steps. The first was the research topic selection, the second was the collection of both primary and secondary sources, the third was source verification or criticism, the fourth was interpretation, and the last was historiography. The results of the study were as follows. (1) The relations between Indonesia and Australia at the beginning of the reform era declined. Its proved by the termination of military realations as well as the publik and government of the two countries give each other a bad perception about it. Attempts to improve bilateral relations between the two countries by Abdurrahman Wahid were hampered by some problems, including domestic refusals and the lack of Australia's response to the Indonesian president's actions. (2) Indonesia-Australia political and military relations in the era of Megawati Soekarnoputri showed an improvement. Indonesia-Australia political relations were greatly helped by the improvement in military relations. (3) The economic relations between Indonesia and Australia in the era Megawati Soekarnoputri ran well. Australia's routine economic aids were given to Indonesia to accelerate the recovery after the 1997 crisis. However, the improvement in the country's economy and people's increasing purchasing power made Indonesia's trade balance likely to experience a deficit. (4) Indonesia-Australia bilateral relations in the educational, social, and cultural relations were enhanced by continuing halted programs and new programs.*

**Keywords:** Indonesia-Australia Relations, Megawati Soekarnoputri.

## PENDAHULUAN

Hubungan Indonesia dan Australia pada masa Soeharto berjalan dengan baik. Indonesia dan Australia memiliki musuh bersama yang diperangi, yakni komunis. Pada masa Presiden Soeharto, komunis memang menjadi ancaman nasional Indonesia. Australia sebagai negara tetangga Indonesia merupakan negara yang juga menganggap komunis sebagai musuh.<sup>1</sup>

Hubungan Indonesia dan Australia mengalami krisis yang besar pada masa Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Timor Timur, salah satu provinsi di Indonesia, melepaskan diri dari NKRI dan memilih merdeka pada tahun 1999. Lepasnya Timor Timur membawa implikasi yang luar biasa terhadap hubungan Indonesia dan Australia.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Hubungan Indonesia-Australia mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada 13 Agustus 2001, Perdana Menteri Australia, John Howard, berkunjung ke Indonesia atas undangan Presiden Megawati. Kunjungan John Howard, menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirayuda, sangat penting dalam meningkatkan hubungan bilateral kedua negara<sup>2</sup>.

## Kajian Pustaka

Penelitian ini berfokus pada hubungan Indonesia-Australia pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004).

Peneliti menggunakan buku karya Richard Chauvel, dkk. berjudul *Indonesia–Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral* yang diterbitkan oleh Granit. Buku karya Richard Chauvel, dkk. tersebut memuat informasi sikap pemerintah Australia terhadap perubahan di politik Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo terdapat lima tahapan pokok dalam metode sejarah yaitu Pemilihan topik, pengumpulan data (*heuristik*), kritik sumber (*Verifikasi*), penafsiran (*interpretasi*), dan penulisan sejarah (*historiografi*).

Pemilihan topik merupakan tahap awal dari penelitian sejarah. Pemilihan topik digunakan untuk menentukan permasalahan yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Pemilihan topik yang baik yaitu berdasarkan pendekatan emosional dan pendekatan intelektual.<sup>3</sup> Kedekatan emosional yang mendasari peneliti untuk menggali lebih dalam tentang topik ini ialah karena ketertarikan akan sejarah hubungan Indonesia dan Australia.

Kedekatan intelektual yang mendasari peneliti memilih topik ini ialah untuk mengetahui lebih mendalam dan mengetahui

---

<sup>1</sup> Philpott, Simon. 2001. *Fear of the Dark: Indonesia and the Australian National Imagination*. *Jurnal Ilmiah*. Toronto: York University. hlm. 379.

<sup>2</sup> PM Howard Penuhi Undangan Megawati. (13 Agustus 2001). *Kompas*.

---

<sup>3</sup> Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang. hlm. 91

bagaimana hubungan Indonesia-Australia pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Heuristik merupakan tahap awal ketika akan menulis karya ilmiah.<sup>4</sup> Pada waktu penelitian, penulis menemukan sumber-sumber sejarah yang berupa sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder.

Sumber-sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari arsip pemerintah Australia yaitu berjudul *Australia Foreign Affairs and Trade White Papers* yang diterbitkan di Canberra pada tahun 2003. Penulis juga menggunakan buku laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia yang berjudul *Statistik Indonesia 2004 – Statistical Year Book of Indonesia 2004* di terbitkan di Jakarta pada tahun 2005.

Sumber sekunder yang digunakan peneliti untuk melengkapi data berkaitan dengan penelitian ini diantaranya: A. Makmur Makka. 2012. *Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie: Dari Ilmuan ke Negarawan sampai “Minandito”*. Jakarta: THC Mandiri. Chauvel, Richard, dkk. 2005. *Indonesia – Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Granit.

Verifikasi merupakan kegiatan untuk memilah-milah dan menguji kebenaran data-data yang terkumpul sehingga semua data itu sesuai dengan fakta sejarah yang sesungguhnya. Menurut Nugroho Notosusanto, Verifikasi itu ada dua macam: kritik intern dan ekstern.<sup>5</sup>

Kritik estern digunakan penulis dengan melihat apakah data yang diperoleh otentik berdasarkan bentuk, bahan, tulisan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan sumber yang didapat penulis berbahasa Inggris sehingga harus diterjemahkan terlebih dahulu.

Interprestasi merupakan suatu penafsiran, mengerti dan mengetahui metode khusus yang diajukan guna mendekati sejarah.<sup>6</sup> Sehingga dalam interpretasi ini perlu dilakukan analisis sumber untuk mengurangi unsur subyektivitas dalam kajian sejarah.

Historiografi merupakan suatu kegiatan dalam menyusun fakta-fakta menjadi sebuah cerita sejarah setelah melakukan berbagai kegiatan yang sebelumnya dilakukan. Setelah menganalisis data, maka akan dihasilkan sintesis hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk karya sejarah yang dituangkan kedalam bentuk tulisan, karena rekonstruksi sejarah di masa lampau hanya akan eksis apabila hasilnya ditulis.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### Hubungan Indonesia-Australia pada awal Reformasi

Perubahan besar terjadi dalam sistem politik di Indonesia pasca turunnya Soeharto. Wakil Presiden B.J. Habibie, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Rencana

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>5</sup> Nugroho Notosusanto. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm. 32.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>7</sup> Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. hlm. 99.

pertama yang dilaksanakan oleh Habibie ialah menjadikan Indonesia lebih demokratis.<sup>8</sup>

B.J. Habibie berhasil membawa perubahan yang begitu besar bagi Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mempunyai rasa takut didalam perdebatan politik mulai berubah. Masyarakat Indonesia lebih terbuka dan menerima politik.<sup>9</sup> B.J. Habibie mendorong DPR agar menyelesaikan dan mengamandemen batang tubuh UUD 1945 terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>10</sup> Pada tahun 1999 berhasil terselenggara sebuah pemilu yang terbuka dan bebas. Untuk pertama kalinya parlemen Indonesia memegang kekuatan seperti yang di amanatkan oleh undang-undang.<sup>11</sup>

Pemilu tahun 1999 yang terlaksana pada masa kepemimpinan B.J. Habibie di puji oleh banyak negara. Keberhasilan B.J. Habibie sebagai presiden dalam melaksanakan pemilu 1999, dilukiskan oleh Stanley Roth<sup>12</sup> sebagai prestasi yang luar biasa.<sup>13</sup> Australia mengirimkan 25 orang sebagai observer guna membantu dan memantau proses pemilu di

Indonesia tahun 1999.<sup>14</sup> Australia juga membantu dengan memberikan bantuan ekonomi sebesar 15 juta US\$ guna kelancaran proses pemilihan umum.

Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden melalui jalur demokratis membawa angin segar bagi Australia. Pada saat bersamaan, Abdurrahman Wahid sebagai seorang demokrat lebih mengakomodasi tekanan publik dan beberapa elit politik di Indonesia untuk tidak menjalin hubungan dengan Australia.<sup>15</sup> Hal ini tentu membuat posisi Presiden Abdurrahman Wahid berada pada posisi dilematis.<sup>16</sup> Berbagai kesempatan perjalanan luar negeri, Abdurrahman Wahid selalu membatalkan rencana kunjungan ke Australia karena tekanan dari dalam negeri.

Rencana pertemuan pejabat kedua pemerintahan terlaksana pada Desember 2000. Pertemuan pejabat kedua pemerintahan ini terlaksana dalam forum pertemuan tahunan tingkat menteri Indonesia-Australia di Canberra, Australia.<sup>17</sup> Forum yang diikuti oleh sebelas menteri Australia dan lima menteri Indonesia.

---

<sup>8</sup> A. Makmur Makka. 2013. *Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie: Dari Ilmuan ke Negarawan sampai Minandito*. Jakarta: THC Mandiri. hlm. 248

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 258.

<sup>11</sup> Manning, Chris & Diermen, Peter v. *Indonesia in Transition, Social Aspects of Reformasi and Crisis*, a.b., Landung Simatupang, dkk. 2000. *Indonesia di Tengah Transisi – Aspek-Aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis*. Yogyakarta: LkiS. hlm. 17.

<sup>12</sup> Stanley Roth ialah Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik. Lihat di A. Makmur Makka . *Op. Cit.* hlm. 255.

<sup>13</sup> Makka, A. Makmur . *Op. Cit.*, hlm. 256.

---

<sup>14</sup> Downer, Alexander. 1999. *Australian Observers to Assist Indonesian Elections*. Di unduh dari [https://foreignminister.gov.au/releases/1999/fa056\\_99.htm](https://foreignminister.gov.au/releases/1999/fa056_99.htm) pada 25 September 2017.

<sup>15</sup> Brown, Colin. 1999. *Australia and Indonesia: The Paradigm Shift, Policy, Organisation and Society*. *Jurnal Ilmiah*. Adelaide: Universitas Flinders. hlm. 106.

<sup>16</sup> Tim Peneliti Hubungan Internasional. 2001. *Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)*. Jakarta: P3I Sekretariat Jenderal DPR-RI. hlm. 236.

<sup>17</sup> Tim Peneliti Hubungan Internasional. *Op. Cit.*, hlm. 238.



Dalam forum ini, Australia menegaskan mendukung integritas nasional Indonesia.<sup>18</sup>

Pada 25 Juni 2001, Abdurrahman Wahid merealisasikan rencana kunjungan kenegaraan ke Australia, setelah beberapa kali dibatalkan. Pada kunjungannya kali ini, ia bertemu langsung dengan John Howard dan beberapa pejabat negara Australia.<sup>19</sup> Kunjungannya kali ini bertujuan membahas hubungan bilateral kedua negara yang jatuh pada kondisi yang cukup buruk.

Menurut Greg Barton<sup>20</sup>, Abdurrahman Wahid lebih responsif mengenai hubungan bilateral kedua negara dibanding John Howard, yang terlalu dingin.<sup>21</sup> Kunjungan Abdurrahman Wahid ke Australia memang di inisiatif sendiri. Hal ini dikarenakan dari Pemerintah Australia yang kurang responsif untuk melakukan perbaikan hubungan bilateral kedua negara.

### **Hubungan Politik Indonesia-Australia pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri**

Pemimpin dunia pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan semenjak Megawati

Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ialah John Howard. Kunjungan Perdana Menteri Australia ini berdasarkan undangan secara lisan dari Presiden Megawati Soekarnoputri sebelumnya.<sup>22</sup> Perdana Menteri Australia ini berkunjung ke Indonesia tanggal 12 Agustus 2001 bertemu langsung dengan Presiden Megawati Soekarnoputri pada sore hari, selama 30 menit.<sup>23</sup>

Kunjungan John Howard ke Indonesia menghasilkan sebuah komunikasi bersama Indonesia-Australia yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2001.<sup>24</sup> Komunikasi bersama itu memuat 15 poin kesepakatan antara Indonesia dan Australia.

Pada Oktober 2002, Indonesia diteror oleh teroris dengan pengeboman di Bali. Pemerintah Australia menyatakan bahwa peristiwa ini tentu mengancam keselamatan warganya yang berada di Bali dan keberlangsungan aktivitas ekonomi sejumlah perusahaan Australia di Indonesia. Sehingga pemerintah Australia menganggap keterlibatannya dalam penyelidikan aksi terorisme Bom Bali I sangat penting.<sup>25</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah Australia memiliki kepentingan nasional untuk

---

<sup>18</sup> Tim Peneliti Hubungan Internasional. *Op. Cit.*, hlm. 239.

<sup>19</sup> Wesley, Michael. 2010. *Perspective on Australian Foreign Policy, 2001*. Jurnal Ilmiah. Canberra: Australian National University. hlm. 51.

<sup>20</sup> Greg Barton ialah seorang profesor yang berfokus pada kajian politik Islam dunia dan juga pakar Indonesia di Australia. Ia pernah membuat sebuah buku biografi tentang Abdurrahman Wahid. Ia sekarang aktif di Institut Alfred Deakin untuk kemanusiaan dan globalisasi pada Universitas Monash, Melbourne Australia. lihat di <https://www.linkedin.com/in/greg-barton-24b7b932/>.

<sup>21</sup> Warta Berita. 2000. *Topik Gema Warta: Gus Dur Ambil Inisiatif Memperbaiki Hubungan Bilateral Indonesia-Australia*. Di unduh dari <https://www.library.ohio.edu/indopubs/2000/03/24/0010.html> pada 06 Desember 2017.

---

<sup>22</sup> PM Howard Penuhi Undangan Megawati. (13 Agustus 2001). *Kompas*.

<sup>23</sup> Diplomasi Gerak Cepat John Howard. (11 Agustus 2001). *Kompas*, hlm. 2.

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> Gyngell, dkk. 2007. *Making Australian Foreign Policy. Edisi Ketiga*. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 180.

menyelamatkan warga dan ekonomi nasionalnya.<sup>26</sup>

Hubungan bilateral kedua negara pada masa Megawati Soekarnoputri sedikit banyak terbantu dengan berbagai isu pertahanan dan keamanan. Peristiwa terorisme di Bali tahun 2002, semakin membuka Indonesia dengan ajakan Australia memperbaiki hubungan bilateral.

Pemerintah Indonesia dan Australia menyepakati *Memorandum of Understanding (MoU) on Combating International Terrorism*<sup>27</sup> yang ditandatangani Direktur Jenderal Hubungan Sosial, Budaya, dan Penerangan, Departemen Luar Negeri Abdurrachman Mattalitti mewakili Indonesia dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Richard Smith di Jakarta, pada Kamis 7 Februari 2002.<sup>28</sup>

Pemerintah Australia kemudian membentuk *Joint Counter-Terrorism Intelligence Unit* yaitu dengan mengirim 46 petugas untuk membantu penyelidikan para pelaku pemboman di Bali. Kelompok yang dikirim oleh Pemerintah Australia ini bertugas

untuk melacak keberadaan buronan teroris asal Malaysia Dr. Azhari dan Noordin M. Top yang terindikasi sebagai tokoh penting dalam berbagai aksi pemboman di Indonesia khususnya di Bali.<sup>29</sup>

Hal yang menjadi fokus hubungan militer Indonesia dan Australia ialah saat dilaksanakannya dua kali *Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (BRMC I)* pada tahun 26-28 Februari 2002 dan *BRMC II* 28-30 April tahun 2003.<sup>30</sup> Penandatanganan kerjasama ini bertujuan mengatasi masalah imigran gelap dan tindakan kejahatan transnasional selain masalah terorisme.

Dokumen resmi tahunan Australia, *Defense Update 2003*, Departemen Pertahanan Australia telah mempertimbangkan untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia tentang kerjasama militer dalam bidang pembebasan sandera (*hostage recovery*) dan anti pembajakan (*counter-hijacking*).<sup>31</sup> Hal ini dijelaskan langsung oleh Jeniffer Rawson, Asisten Sekretaris I, bidang Asia Selatan dan Asia Tenggara, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia pada 1 Mei

---

<sup>26</sup> Australian Department of Foreign Affairs and Trade. 2003. *Australian Foreign Affairs White Paper: Advancing National Interest*. Canberra: Australian Government Publishing. hlm. xix.

<sup>27</sup> *Memorandum of Understanding (MoU)* merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. Sepanjang materi yang di atur bersifat teknis, *Memorandum of Understanding* dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya perjanjian induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat segera berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan. Lihat di Silvi Haryani.

<sup>28</sup> Hardiana, I Made Yuda, dkk. 2014. *Kerjasama Kontra-Terorisme antara Australia dengan Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme di Indonesia (2002-2008)*. *Jurnal Ilmiah*. Denpasar: Universitas Udayana. hlm. 4.

---

<sup>29</sup> Seniawati. 2014. *The Role in Countering Terrorism in Indonesia*. *Jurnal Ilmiah*. Makassar: Universitas Hasanuddin. hlm. 560.

<sup>30</sup> Haryani. Silvia. 2007. *The Indonesia and Australia Counter-Terrorism Cooperation: Comparison Between Megawati Soekarnoputri and Susilo Bambang Yudhoyono Government*. *Jurnal Ilmiah*. Surabaya: Universitas Airlangga. hlm. 5.

<sup>31</sup> Joint Standing Committee Hearing on Foreign Affairs, Defense and Trade Sub committee on Foreign Affairs. 2003. *On Australia and Indonesia relations*. Canberra: Commonwealth of Australia. hlm. 21.

2003.<sup>32</sup> Ia menyatakan kemungkinan dimulai lagi kerjasama dengan pasukan Kopassus dibidang pembebasan sandera dan penanganan pembajakan.<sup>33</sup>

Pertemuan *Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue* (IADSD) yang kedua di Yogyakarta pada 2004, Australia kembali mengutarakan keinginan agar Kopassus terlibat dalam latihan bersama di Canberra.<sup>34</sup> Pihak Indonesia merespon baik tawaran Australia ini, namun masih perlu menunggu komitmen dari pimpinan politik kedua negara sebagai landasan kerjasama tersebut.<sup>35</sup>

Bagi Indonesia, selain isu keamanan konvensional, terdapat isu keamanan nontradisional seperti ancaman teroris, konflik komunal, penyelundupan kayu, penyelundupan komoditas/barang, penyelundupan manusia, keamanan maritim dan lain-lain.<sup>36</sup> Posisi Indonesia yang dan kapabilitas Indonesia dalam menjaga wilayah maritimnya cukup lemah. Oleh sebab itu, Australia memiliki kepentingan bahwa stabilitas kawasan, termasuk Indonesia, menjadi prioritas perhatiannya.<sup>37</sup>

### **Hubungan Ekonomi Indonesia-Australia pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri**

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade. *Op. Cit.*, hlm. 29.

<sup>34</sup> Laporan Kementerian Pertahanan. 2009. *Sekilas Hasil Dialog Informal Indonesia Australia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia. hlm. 4.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Departemen Pertahanan Indonesia. 2003. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003: Memasuki Abad 21*. Jakarta: Departemen Pertahanan Indonesia.

<sup>37</sup> Commonwealth of Australia. *Op. Cit.*, hlm. 30-31.

Buku Putih Luar Negeri dan Perdagangan tahun 2003, menyatakan bahwa Australia memiliki kepentingan ekonomi terhadap Indonesia. Pada tahun 2000, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-10 bagi Australia.<sup>38</sup> Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menjadi pasar potensial untuk pemasaran produk-produk Australia. Di Indonesia terdapat kurang lebih 400 perusahaan Australia.<sup>39</sup> Oleh sebab itu, stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia menjadi penting bagi Australia.

Ikrar Nusa Bhakti<sup>40</sup> menyatakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang prospektif bagi ekonomi Australia. Sehingga membantu ekonomi Indonesia dan pengembangan sumber daya manusia adalah bagian dari kebijakan luar negeri Australia. Hal ini dilakukan agar ekonomi Indonesia terus berkembang dan mampu menyerap barang/jasa dari Australia.<sup>41</sup>

Perbedaan penguasaan teknologi dengan Indonesia, membuat Australia dapat memasarkan hasil barang dan jasa ke Indonesia. Berdasarkan data perdagangan kedua yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan Indonesia tahun 2004, ekspor ke Australia berjumlah 1.887,4 juta US\$. Hal ini berbanding dengan Impor Indonesia ke

---

<sup>38</sup> Dept. of Foreign Affairs and Trade. 2004. *Transnational Terrorism: The Threat to Australia*. Canberra: Commonwealth of Australia. hlm. 81.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Ikrar Nusa Bhakti adalah profesor riset di Pusat Penelitian Politik LIPI. Ia sekarang ditugaskan negara untuk menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tunisia. Lihat di klik infokom dan Merdeka.com.

<sup>41</sup> Ikrar Nusa Bhakti. 2006. *Merajut Jaring-Jaring Keamanan Indonesia Australia: suatu upaya untuk menstabilkan hubungan bilateral kedua negara*. Jakarta: LIPI. hlm. 21.

Australia yang berjumlah total 2.214,9 juta US\$.<sup>42</sup>

Semakin membaiknya ekonomi pasca krisis 1997, membuat daya beli masyarakat Indonesia mulai meningkat kembali. Pada tahun 2003, jumlah total ekspor Indonesia ke Australia sebesar 1.791,6 juta US\$. Sedangkan jumlah total impor Indonesia dari Australia sebesar 1.648,4 juta US\$. Pada tahun 2004, jumlah total ekspor Indonesia ke Australia sebesar 1.887,4 juta US\$. Sedangkan jumlah total impor Indonesia dari Australia sebesar 2.214,9 juta US\$.<sup>43</sup>

Tahun 2003 hingga 2004, Proyek-proyek penanaman modal luar negeri yang telah disetujui Pemerintah Indonesia dari Australia sebanyak 72 proyek dengan nilai investasi 606,6 Juta US\$. Sejak tahun 1967 hingga 2004, proyek-proyek penanaman modal luar negeri yang disetujui Pemerintah Indonesia dari Australia sebanyak 665 proyek dengan nilai investasi 12.293,1 Juta US\$.

Menjalin kerjasama ekonomi dengan Indonesia, adalah salah satu cara Australia mencapai tujuan nasional negaranya. Australia menghendaki Indonesia cukup mapan dalam bidang ekonomi. Hal ini akan sangat berpengaruh untuk kestabilan Indonesia. Kestabilan yang baik di Indonesia, akan berpengaruh baik bagi kawasan.

Pada masa Megawati Soekarnoputri, Australia rutin memberikan bantuan ekonomi setiap tahunnya. Indonesia merupakan negara penerima bantuan ekonomi terbesar Australia di banding negara Asia Timur lainnya. Pada tahun 2001-2002, Indonesia total menerima bantuan ekonomi dari Australia sebesar 121,5 juta dolar US\$.<sup>44</sup>

Indonesia merupakan penerima terbesar pertama diantara negara Asia Timur dengan persentase sebesar 27% dari 100% pada tahun 2002-2003. Indonesia menerima bantuan dari Australia dengan total sebesar 130,7 juta dolar US. Bantuan ekonomi juga digunakan untuk pengembangan manajemen ekonomi, penguatan institusi dan penguatan stabilitas keamanan, pemerintahan yang transparan serta kualitas dari pelayanan publik<sup>45</sup>.

Pada tahun 2003-2004, Indonesia menerima bantuan dari Australia sebanyak 125.1 juta US\$. Indonesia juga mendapat bantuan dari pemerintahan Australia yang lain, selain pemerintah pusat, dengan total bantuan yang diterima Indonesia sebesar 150 juta US\$. Jumlah

---

<sup>42</sup> Badan Pusat Statistik. 2005. *Statistik Indonesia 2004 – Statistical Year Book of Indonesia 2004*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. hlm. 166-173.

<sup>43</sup> *Ibid*.

---

<sup>44</sup> Departmen of Comumunications, Information Technology and the Arts. 2002. *Australian Agency For International Development: Annual Report 2001-2002*. Canberra. hlm. 58. Di akses dari [http://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/annual-reports/australian-agency-for-international-development-annual-report-2001-2002/pdf/annualreport01\\_02.pdf](http://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/annual-reports/australian-agency-for-international-development-annual-report-2001-2002/pdf/annualreport01_02.pdf) pada 5 September 2017.

<sup>45</sup> Departmen of Comumunications, Information Technology and the Arts. 2003. *Australian Agency For International Development: Annual Report 2002-2003*. Canberra. Di unduh dari <http://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/annual-reports/australian-agency-for-international-development-annual-report-2002-2003/inde%E2%80%A6> pada 5 September 2017.



ini meningkat 13 persen dibanding tahun sebelumnya.<sup>46</sup>

Rumah sakit Sanglah juga akan mendapat bantuan dalam hal meningkatkan pelatihan kesehatan dan perbaikan disiplin medis.<sup>47</sup> Bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia tahun 2004, salah satu programnya ialah membantu pada bidang pendanaan untuk suksesnya proses pemilu. Bagi Australia, pemilu tahun 2004 di Indonesia sangat penting.<sup>48</sup>

Pada tahun 2004-2005, Indonesia menerima total bantuan dari Australia sebesar 270,3 juta US\$. Jumlah ini meningkat 70 persen dibanding tahun 2003. Pada tahun 2004, Indonesia menerima porsi bantuan yang diberikan Australia kepada negara-negara Asia Timur sebesar 42%. Selama 5 tahun sejak disepakatinya kerjasama dengan Australia, Indonesia akan menerima total bantuan ekonomi sebanyak 2 milyar dolar US\$.<sup>49</sup>

Setiap bantuan ekonomi yang diberikan Australia, tujuan utamanya selalu menginginkan Indonesia yang tetap utuh, makmur dan membangun demokrasi yang baik. Kemampuan Indonesia dalam meningkatkan perkembangan ekonomi, reformasi, perkembangan

desentralisasi dan kestabilan ekonomi Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi Australia.<sup>50</sup>

Ada beberapa tujuan pokok dari bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia. Program bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia juga bertujuan mendukung kebijakan pengurangan angka kemiskinan dan kelanjutan perkembangan ekonomi.<sup>51</sup>

Pada tahun 2000, penerimaan devisa negara dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sejumlah 5.748,80 juta US\$.<sup>52</sup> Tujuan wisata paling terkenal dan paling sering dikunjungi bagi wisatawan mancanegara adalah Provinsi Bali. Salah satu warga negara asing yang sering berkunjung dan berwisata ke Indonesia, khususnya Bali, ialah warga negara Australia.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2000-2002, wisatawan Australia yang berwisata ke Indonesia sebanyak 1.204.221 kunjungan.<sup>53</sup>

*Travel warning* yang di keluarkan oleh pemerintah Australia baik pasca terjadinya bom Bali dan pada tahun 2003 kepada masyarakatnya untuk tidak mengunjungi Indonesia,<sup>54</sup> sedikit

<sup>46</sup> Australian Government. 2004. *AusAID: Annual Report 2003-2004*. Canberra: National Capital Printers. hlm. 61.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 62.

<sup>49</sup> Department of Foreign Affairs and Trade. 2005. *AusAID: Annual Report 2004-2005*. Canberra: Pirion. hlm. 61. Di unduh dari [http://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/annual-reports/australian-agency-for-international-development-annual-report-2004-2005/pdf/anrep04\\_05.pdf](http://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/annual-reports/australian-agency-for-international-development-annual-report-2004-2005/pdf/anrep04_05.pdf) pada 5 September 2017.

<sup>50</sup> Department of Communications, Informations, Information Technology and the Arts. 2003. *Australias's Overseas AID Program 2003-2004: Statement by the Honourable Alexander Downer MP Minister for Foreign Affairs 13 May 2003*. Canberra: Canprint Communications Pty Ltd. hlm. 28.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia. *Op. Cit.*, hlm. 387.

<sup>53</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia. *Op. Cit.*, hlm. 384.

<sup>54</sup> Liputan6. 2003. *Inggris-Australia Melarang warganya ke Indonesia*. Di akses dari [news.liputan6.com/read/54825/inggris-australia-melarang-](http://news.liputan6.com/read/54825/inggris-australia-melarang-)

banyak memberikan berpengaruh turunnya jumlah wisatawan Australia ke Indonesia pada tahun-tahun selanjutnya. Terjadi penurunan jumlah wisatawan Australia dan dunia ke Bali. Hal ini terus berlangsung hingga beberapa tahun berikutnya.<sup>55</sup>

### **Hubungan Bilateral Di Bidang Sosial, Budaya dan Pendidikan Indonesia-Australia pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri**

Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun mengundurkan diri pada tahun 1998. Terdapat dua isu besar yang cukup menjadi pusat perubahan Indonesia pada awal reformasi, yaitu tuntutan agar Indonesia menjalankan demokrasi dengan utuh dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dua hal ini pula yang menjadi salah satu alasan tuntutan rakyat Indonesia agar Soeharto mundur sebagai presiden.

Tuntutan perubahan di Indonesia membuat Australia berusaha ikut serta dalam prosesnya.<sup>56</sup> Sebagian besar program ini dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia yang menggandeng lembaga yang telah ada, salah satunya yaitu *Australia-Indonesia Institute*.<sup>57</sup>

---

[warganya-keindonesia?source=search](#) pada 24 Agustus 2017

<sup>55</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2014. *Tinjauan Perekonomian Bali 2013*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. hlm. 91.

<sup>56</sup> Jamie Mackie. 2007. *Australia and Indonesia: Current Problem and Future Prospects*. Canberra: Institut Lowy. hlm. 22.

<sup>57</sup> Lihat di Australia-Indonesia Institute. 2004. *Australia-Indonesia Institute Annual Report 2003-2004*. Canberra: Document Printing Australia.

Beberapa langkah kerjasama bilateral yang melibatkan masyarakat kedua negara dicetuskan oleh Australia. Program-program ini dilaksanakan guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat kedua negara yang terlibat untuk mengetahui karakteristik negara tetangganya.<sup>58</sup>

Setiap tahunnya, ratusan pelajar Indonesia meneruskan pendidikannya ke Australia. Pada tahun 2004, jumlah pelajar Indonesia di Australia berjumlah sekitar 18.000 orang. Diantara 18.000 orang yang belajar di Australia, sebagian diantaranya menerima beasiswa Pemerintah Australia, melalui AusAID.

### **KESIMPULAN**

Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, hubungan politik kedua negara banyak terbantu dengan kerjasama pada bidang pertahanan dan keamanan. Isu-isu mengenai terorisme yang melanda dunia memaksa Indonesia dan Australia mengambil kebijakan yang dapat mempertahankan keamanan negara.

Hubungan ekonomi Indonesia dan Australia pada awal reformasi tidak banyak mengalami gangguan, meskipun hubungan politik kedua negara sedang dingin. Penurunan intensitas ekspor dan impor dari Indonesia disebabkan belum pulihnya ekonomi negara pasca krisis tahun 1997.

Hubungan di bidang sosial, budaya dan pendidikan Indonesia dan Australia berjalan dengan beragam program kerjasama. Tujuan

---

<sup>58</sup> Lihat di *Australia-Indonesia Annual Report 2003-2004*.

dari berbagai macam kerjasama ini ialah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat Indonesia yang terlibat dalam kerjasama mengenai bagaimana kehidupan masyarakat Australia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A. Makmur Makka. 2013. *Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie: Dari Ilmuan ke Negarawan sampai Minandito*. Jakarta: THC Mandiri.

Caporaso, James A. David P Levine, *Theories Of Political Economy*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), a.b suraji, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Gyngell, dkk. 2007. *Making Australian Foreign Policy. Edisi Ketiga*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hans, J. Morgenthau. 1990. *Politik Antarbangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.

Nugroho Notosusanto. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sartono Kartodirdjo. 1982. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suparmini, dkk. 2009. *Dasar-Dasar Geografi*. Yogyakarta: UNY Press. hlm. 10.

Tim Peneliti Hubungan Internasional. 2001. *Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)*. Jakarta: P3I Sekretariat Jenderal DPR-RI.

### Arsip

Advancing the National Interest. 2003. *Australia Foreign Affairs and Trade White Papers*. Canberra: Commonwealth of Australia.

Australian Department of Foreign Affairs and Trade. 2003. *Australian Foreign Affairs White Paper: Advancing National Interest*. Canberra: Australian Government Publishing.

Australian Government. 2004. *AusAID: Annual Report 2003-2004*. Canberra: National Capital Printers.

Australia-Indonesia Institute. 2004. *Australia-Indonesia Institute Annual Report 2003-2004*. Canberra: Document Printing Australia.

Badan Pusat Statistik. 2005. *Statistik Indonesia 2004 – Statistical Year Book of Indonesia 2004*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2014. *Tinjauan Perekonomian Bali 2013*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

### Koran

PM Howard Penuhi Undangan Megawati. (13 Agustus 2001). *Kompas*.

PM Howard Penuhi Undangan Megawati. (13 Agustus 2001). *Kompas*.

Diplomasi Gerak Cepat John Howard. (11 Agustus 2001). *Kompas*.

### Jurnal Ilmiah

Brown, Colin. 1999. *Australia and Indonesia: The Paradigm Shift, Policy, Organisation and Society*. *Jurnal Ilmiah*. Adelaide: Universitas Flinders.

Hardiana, I Made Yuda, dkk. 2014. *Kerjasama Kontra-Terrorisme antara Australia dengan Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Terrorisme di Indonesia (2002-2008)*. *Jurnal Ilmiah*. Denpasar: Universitas Udayana.

Haryani. Silvia. 2007. *The Indonesia and Australia Counter-Terrorism Cooperation: Comparison Between Megawati Soekarnoputri and Susilo Bambang Yudhoyono Government*. *Jurnal Ilmiah*. Surabaya: Universitas Airlangga.

### Online



Department of Foreign Affairs and Trade. 2002. *AusAID Annual Report 2001-2002*. Canberra: Commonwealth of Australia. Di akses dari <http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/ausaid-annual-report-2001-2002.aspx> pada 17 Desember 2017.

Department of Communications, Information Technology and the Arts. 2002. *Australian Agency For International Development: Annual Report 2001-2002*. Canberra. hlm. 58. Di akses dari <http://dfat.gov.au/aboutus/publications/corporate/annual-reports/australian-agency-for-international-development-annual-report-2001-2002/pdf/annualreport01-02.pdf> pada 5 September 2017.

Department of Communications, Information Technology and the Arts. 2003. *Australian Agency For International Development: Annual Report 2002-2003*. Canberra. Di unduh dari <http://dfat.gov.au/aboutus/publications/corporate/annual-reports/australian-agency-for-international-development-annual-report-2002-2003/inde%E2%80%A6> pada 5 September 2017.

Department of Foreign Affairs and Trade. 2005. *AusAID: Annual Report 2004-2005*. Canberra: Pirion. hlm. 61. Di unduh dari [http://dfat.gov.au/aboutus/publications/corporate/annual-reports/australian-agency-for-international-development-annual-report-2004-2005/pdf/anrep04\\_05.pdf](http://dfat.gov.au/aboutus/publications/corporate/annual-reports/australian-agency-for-international-development-annual-report-2004-2005/pdf/anrep04_05.pdf) pada 5 September 2017.

Downer, Alexander. 1999. *Australian Observers to Assist Indonesian Elections*. Di unduh dari [https://foreignminister.gov.au/releases/1999/fa056\\_99.html](https://foreignminister.gov.au/releases/1999/fa056_99.html) pada 25 September 2017.

Liputan6. 2002. *Australia Menilai Penungguan Korban Lumban*. Di akses dari <https://global.liputan6.com/read/43169/australia-menilai-penanganankorbanlumban?source=search> pada 24 Agustus 2017

Liputan6. 2003. *Inggris-Australia Melarang warganya ke Indonesia*. Di akses dari [news.liputan6.com/read/54825/inggris-australia-melarang-warganyakeindonesia?source=search](https://news.liputan6.com/read/54825/inggris-australia-melarang-warganyakeindonesia?source=search) pada 24 Agustus 2017

Tentang Greg Barton. lihat di <https://www.linkedin.com/in/greg-barton-24b7b932/>

Warta Berita. 2000. *Topik Gema Warta: Gus Dur Ambil Inisiatif Memperbaiki Hubungan Bilateral Indonesia-Australia*. Di unduh dari <https://www.library.ohio.edu/indopubs/2000/03/24/0010.html> pada 06 Desember 2017

Dosen Pembimbing



Saefur Rochmat, S. Pd., M. Ir., Ph.D.  
NIP. 19681122 199403 1 001

Reviewer



M. Nur Rokhman, M. Pd  
NIP. 19660822 199203 1 002